

ARTIKEL

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DI TAMAN MARGASATWA KOTA SEMARANG

Oleh :

Henny Rachmawati P, Zaenal Hidayat, Dewi Rostyaningsih

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In reducing environmental pollution, Semarang municipality has made a local regulation number 13 on the year of 2006 on environmental control. It was intent to environmental control for reducing its pollutions that caused by organic wastes as well as inorganic one. Because, it can have a effect negatively for human and animals who are getting in, and the gases those are coming from decomposition, combustion or even disposal process interfere health as well. The office of technical implementing got target for realizing environmental wildlife park which to be clean an health.

The reasearch used a descriptive qualitative method that lovated on the area of Semarang wildlife park and focus on its policy implementation of environmental control. There were two data sources such primary and secondary. Its instruments used as research instrument, interview guide, and informant. The way how to determine its technique that applied snowball sampling while collecting data using interview, observation, and library reasearch to get the whole data. Afterwards this analysis using the technique of domain and taxonomic data analizes.

There were four phenomena which observed on this study. They were implementation policy by the factors of communications, resources, and stances. From the research, policy implementation has been running well. Where as communication and stances had been done very good, that by socializing those policy and supported its regulations as well. However this needed more staffs to fulfill this kind of implementations. This regulations was very substantial for producing environmentally are clean and free of contaminations.

Keyword : Environmental controlling and its pollutions

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kota Semarang telah memiliki taman margasatwa sejak tahun 1954. Kebun binatang ini terletak di perbatasan Semarang - Kendal. Tempat yang dibuka pada Februari 2007 ini dibangun untuk menggantikan kebun binatang Tinjomoyo Semarang yang dianggap sudah tak representative lagi.

Untuk menjaring masyarakat dan wisatawan sebanyak mungkin, setiap kawasan wisata alam harus menjaga keunikan, kelestarian, dan keindahannya. Semakin banyak kunjungan wisatawan, maka aktivitas dikawasan tersebut akan meningkat, baik aktivitas sosial maupun ekonomi. Setiap aktivitas yang dilakukan, akan menghasilkan manfaat ekonomi bagi kawasan tersebut. Tetapi limbah atau sampah yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut dapat mengancam kawasan wisata alam.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pemerintah membuat peraturan daerah ini karena untuk mewujudkan lingkungan hidup daerah yang baik dan sehat.

Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran pencemaran lingkungan dan limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan di Taman Margasatwa

terutama bagi kesehatan manusia dan satwa yang ada disana, gas-gas yang dikeluarkan dalam proses pembusukan, pembakaran, ataupun pembuangan limbah juga dapat mengganggu kesehatan, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap pencemaran lingkungan.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Taman Margasatwa Kota Semarang
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Taman Margasatwa.

C. TEORI

Teori yang digunakan adalah :

1. Kebijakan Publik

James Anderson mendefinisikan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Riant Nugroho, 2006 : 23).

Untuk lebih jelasnya, secara lebih sederhana siklus kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Formulasi Kebijakan (Perumusan Kebijakan)

Perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik,

karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Ini merupakan suatu permulaan dari kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan

Dalam kelompok ini terdapat kegiatan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi kepentingan.

c. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pencapaian tujuan seperti yang telah digarisbesarkan dalam keputusan melalui tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu atau pejabat – pejabat kelompok pemerintah dan swasta.

Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Persyaratan utama bagi komunikasi yang efektif ialah bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang mereka kerjakan. Keputusan – keputusan kebijakan dan perintah – perintah penerapan harus

disalurkan kepada orang – orang yang tepat, sehingga komunikasi harus akurat dan secara akurat diterima oleh para pelaksana.

b. Sumber – sumber daya

Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan, maka implementasi pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber – sumber dapat merupakan faktor yang dalam melaksanakan kebijakan publik.

c. Sikap / Kecenderungan

Sikap – sikap juga merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implementasi. Jika pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya.

3. Komunikasi

Menurut T. Hani Handoko (2003:272) komunikasi merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata – kata yang digunakan

dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal dan sebagainya. Tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan antara lain:

- a. Transmisi
 - b. Kejelasan
 - c. Konsistensi
4. Sumberdaya
- Menurut Ginanjar Kartasasmitra (1997:54) memberikan pengertian bahwa sumber daya pada pokoknya berupa dana (modal), sumber daya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan. Di dalam hal ini dana bersumber dari pemerintah dan masyarakat. Perlu juga disiapkan SDM yang cukup (kuantitas) dan berkualitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Sumber – sumber daya penting dalam implementasi kebijakan yang efektif menurut Edwards (Tangkilisan, 2003:55) terdiri dari :
- a. Staf,
 - b. Informasi yang memadai,
 - c. Wewenang untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan, pembuatan keputusan dan penetapan sanksi.
 - d. Fasilitas.
5. Sikap Pelaksana Kebijakan
- Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat, atau tujuan yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang wajar. Sedangkan Gibson (1993:57) mendefinisikan sikap sebagai berikut “Sikap adalah kesiapsiagaan mental, yang dipelajari dan diorganisasikan

melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, objek dan situasi yang berhubungan dengannya.”

D. METODE

1. Desain Penelitian menggunakan tipe Penelitian Deskriptif.
2. Lokasi dan Fokus Penelitian
 - ☐ lokus penelitian di kawasan Taman Margasatwa.
 - ☐ Fokus Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Margasatwa Kota Semarang.
3. Sumber Data
Sumber data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunde
4. Instrumen penelitian
menggunakan peneliti sebagai instrumen penelitian, interview guide, informan
5. Tehnik penentuan informan penelitian
menggunakan snowball sampling
6. Tehnik pengumpul data
dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka
7. Tehnik analisis data
menggunakan tehnik analisis data domain dan analisis data taksonomi

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Deskripsi Implementasi Kebijakan Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Margasatwa.

Pada awalnya pengendalian lingkungan hidup di Taman Margasatwa dimulai dari pengelolaan limbah padat yang ada disana. Limbah ini dihasilkan dari

sampah organik yaitu kotoran hewan yang dikelola menjadi pupuk hijau composting dan pupuk kandang. Sampah anorganik meliputi sampah dari restoran, dapur, hasil kemasan, sobekan karcis, kegiatan operasional taman satwa, daun-daun. Ada verban, jarum suntik, obat-obatan merupakan limbah klinik hewan yang dikumpulkan dan dibakar dengan incinerator. Limbah padat ini dikelola untuk mengurangi tingkat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah tersebut.

Saat ini, Pemerintah Kota Semarang juga membantu dalam pengelolaan limbah dengan memberikan alat bantu untuk mengolah limbah organik maupun anorganik dan menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Lingkungan yaitu Peraturan Daerah No.13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup. Dengan adanya dasar hukum tersebut, pencemaran lingkungan khususnya pada Lingkungan Taman Margasatwa menjadi lebih baik.

Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Margasatwa

Mekanisme pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup sudah memiliki pengelolaan yang jelas dengan cara mengumpulkan sampah-sampah yang terdiri dari kertas, daun, styrofoam, botol minuman menjadi satu kemudian sampah tersebut diolah menjadi kompos, apabila ada ranting daun yang berjatuh bisa dipakai untuk makanan hewan. Tetapi masih ada

beberapa hal yang kurang mengenai kurangnya staf dalam menjaga dan merawat lingkungan Taman Margasatwa serta pihak Taman Margasatwa belum pernah melaporkan apabila terjadi kerusakan lingkungan kepada instansi yang bertanggungjawab, sedangkan Perwal Semarang Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan setiap kegiatan/usaha wajib mengendalikan pencemaran lingkungan dan melaporkan bila terjadi kerusakan lingkungan kepada instansi yang bertanggungjawab.

Hasil Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Margasatwa

Hasil dari pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah No.13 Tentang Pengendalian Hidup ini adalah masih banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan serta tempat sampah yang masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan hasil pelaksanaan kebijakan masih kurang memuaskan.

Proses komunikasi kebijakan yang dilakukan selama ini pelaksana kebijakan UPTD Taman Margasatwa memang mengetahui peraturan tersebut. Namun pada tingkat konsistensi pesan kebijakan, pelaksana kebijakan yaitu UPTD Taman Margasatwa belum sepenuhnya konsisten terhadap pesan kebijakan tetapi mengalami kendala dalam penyampaian informasi yang diberikan.

Sumberdaya yang digunakan dalam Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No.13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman

Margasatwa kota Semarang memang ada yang belum memadai yaitu mengenai pemberian informasi dalam melaksanakan kebijakan pengendalian lingkungan hidup ini hanya melalui mulut ke mulut saja, pemerintah jarang berkunjung ke Taman Margasatwa.

Sikap pemerintah melalui UPTD Taman Margasatwa sangat mendukung dengan adanya Peraturan Daerah No.13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup tetapi pemerintah kota pelan-pelan kurang memperhatikan UPTD Taman Margasatwa dan ini dapat menyebabkan juga implementasi kebijakan tidak berjalan dengan lancar.

B. ANALISIS

Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Margasatwa

Mekanisme Pengendalian lingkungan yang di pusatkan pada limbah dan lingkungan Taman Margasatwa ini, dalam pelaksanaan pengelolaan limbah sudah sesuai prosedur yang ada pada perda yang berfungsi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Tetapi ada beberapa yang belum dilaksanakan oleh UPTD Taman Margasatwa terkait dengan pelaporan pada instansi yang bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan.

Kemudian pada Komunikasi, implementasi kebijakan Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Margasatwa Kota Semarang dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu, konsistensi dan kejelasan kebijakan tersebut dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup. Namun pada tingkat konsistensi

pesan kebijakan, para pelaksana yaitu UPTD Taman Margasatwa Kota Semarang belum sepenuhnya konsisiten terhadap pesan kebijakan.

Pada Sumberdaya dalam implementasi kebijakan di Taman Margasatwa Kota Semarang, jumlahnya sementara ini dirasa masih kurang. Walaupun tidak memiliki staf khusus pengelolaan limbah, para staf – staf yang ada disana juga sudah diberikan pelatihan-pelatihan cara pengelolaan limbah yang baik dan benar. Selain itu, informasi serta wewenang juga sangat penting bagi Taman Margasatwa. Kemudian sumber-sumber yang terakhir adalah fasilitas-fasilitas. Fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan pengelolaan limbah sudah memenuhi kebutuhan seperti TPST atau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu, sarung tangan, masker, alat pengolahan limbah dan lain-lain.

Sikap pelaksana kebijakan sangat mendukung dengan adanya peraturan daerah tentang pengendalian lingkup yang dirasa sangat membantu dalam menjalankan lingkungan sehat dan mengurangi pencemaran di Taman Margasatwa.

Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Margasatwa

Hasil dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan UPTD Taman Margasatwa, dalam melaksanakan tujuan dari pengendalian lingkungan hidup ini tidak menyimpang seperti yang disebutkan dalam pasal 3,

pengendalian lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup daerah yang baik dan sehat. Mekanisme ini sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan.

1. Komunikasi yang terjadi di antara pihak – pihak yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah tersebut, seharusnya dapat berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan misscommunication. Hal ini dapat dicegah dengan selalu memperhatikan para staf dalam melaksanakan kebijakan, dan melakukan briefing setiap minggunya.
2. Dalam Sumberdaya, jumlah staf di Taman Margasatwa masih kurang walaupun saat ini pihaknya belum memerlukan penambahan jumlah staf. Staf-staf ini kebanyakan dari staf kebersihan, walaupun dari staf kebersihan mereka sudah dibekali pelatihan terlebih dahulu oleh pemerintah sehingga dalam pelaksanaannya sudah memiliki bekal untuk melaksanakan pengelolaan dengan benar.
3. Arah sikap pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. sikap pelaksana kebijakan di Taman Margasatwa sangat mendukung dengan adanya peraturan ini. Tetapi, dalam mendukung sikap para pelaksana ini ada beberapa staf yang mengeluhkan mengenai perlengkapan yang dibutuhkan seperti penambahan tempat sampah yang sangat diperlukan untuk menunjang

pengendalian lingkungan hidup ini.

Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Komunikasi dan Sikap Pelaksana Kebijakan. *Pertama* dalam Komunikasi, Kepala UPTD Taman Margasatwa berupaya untuk mensosialisasikan pesan yang terdapat dalam Perda tersebut kepada para stafnya. Dan selalu mengadakan briefing bersama seluruh staf untuk membahas hal-hal apa saja yang perlu dibenahi di lingkungan Taman Margasatwa. Sehingga komunikasi sangat dibutuhkan guna menjalankan kebijakan tersebut sesuai yang telah diatur. *Kedua*, Sikap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan ini sangat menyambut dengan baik dan sangat antusias karena dapat membantu keberlangsungan lingkungan Taman Margasatwa agar tidak terjadi pencemaran lingkungan dan dapat memperbaiki lingkungan melalui kebijakan tersebut.

Sedangkan Faktor Pengambat dari Implementasi Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup adalah Sumberdaya. Sumberdaya merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Sama halnya dengan implementasi kebijakan Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Margasatwa juga memerlukan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara berkesinambungan. Jumlah staf yang masih kurang, informasi yang kurang juga merupakan penyebab dari pengahambatnya implementasi ini.

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pengendalian Lingkungan Hidup belum sepenuhnya berhasil mengurangi pencemaran
2. Komunikasi yang telah dilakukan Kepala UPTD Taman Margasatwa adalah berupaya untuk mensosialisasikan pesan yang terdapat dalam Perda tersebut kepada para stafnya.
3. Sumberdaya yang digunakan di dalam implementasi kebijakan Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Taman Margasatwa dirasa kurang memadai karena tidak ada staf khusus pengelolaan limbah
4. Sikap pelaksana kebijakan yaitu UPTD Taman Margasatwa sangat mendukung adanya Peraturan Daerah No.13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup

B. REKOMENDASI

1. UPTD Taman Margasatwa harus ada peningkatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dari seluruh pihak yang terkait untuk menyusun perencanaan kebijakan yang lebih berkompeten terhadap pengendalian lingkungan hidup agar berkuwalitas dan tepat pada sasaran.
2. Pelaksana kebijakan yaitu UPTD Taman Margasatwa harus melakukan sosialisasi lebih intensif kepada seluruh staf dan para pengunjung. Serta UPTD Taman Margasatwa seharusnya lebih konsisten dengan pesan kebijakan tersebut.

3. UPTD Taman Margasatwa seharusnya menambah jumlah staf agar dapat konsentrasi terhadap pengelolaan limbah, dan menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan asri serta lebih memperhatikan fasilitas yang ada disana terutama tempat sampah dan menempatkan tempat sampah pada tempat – tempat yang sering di datangi pengunjung.
4. UPTD Taman Margasatwa seharusnya dapat mempertahankan sikap yang mendukung kebijakan ini, walaupun pemerintah kota kurang memperhatikan

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang : Model – Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik : Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.